



**Katalog BPS : 73152.0501**

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2005/2006**

**KERJASAMA  
BADAN PUSAT STATISTIK DAN BAPEDA  
KABUPATEN PINRANG**

***BPS* BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG**  
JL. ANDI ISA NO. 18 PINRANG 91211 TELP. (0421) 921021 FAX. (0421) 3912253

<http://pinrangkab.go.id>

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2005**

NO. PUBLIKASI : 73152.0501

UKURAN BUKU : 16,5 cm X 21,5 cm

JUMLAH HALAMAN : 50 HALAMAN

NASKAH : SEKSI STATISTIK SOSIAL

PENYUNTING : SEKSI STATISTIK SOSIAL

GAMBAR KULIT : SEKSI STATISTIK SOSIAL

DICETAK OLEH : UD. Areso Makassar

DITERBITKAN OLEH : BPS KABUPATEN PINRANG  
Jl. Andi Isa No. 18 Pinrang

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.*



**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
KABUPATEN PINRANG**

---

**SAMBUTAN**

Kebutuhan konsumen data akan data statistik makin kompleks khususnya data sosial ekonomi penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang bekerjasama dengan BAPEDA Kabupaten Pinrang menerbitkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005.

Dalam publikasi ini digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu ukuran yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia terutama upaya pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia dan partisipasinya dalam pembangunan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan publikasi ini. Kami menyadari dalam publikasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya.

Pinrang, Oktober 2006

**BAPEDA KABUPATEN PINRANG**  
**K e p a l a,**

**DRS. H. SYARIFUDDIN SIDE, M.Si**  
**NIP. 010 156 827**

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang tahun 2005 disusun sebagai upaya untuk mengetahui dan mengukur pencapaian pembangunan terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu juga memuat berbagai indikator pendukung IPM antara lain indikator kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan yang secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat.

Data yang digunakan untuk menganalisis adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan SUSENAS 2005.

Disadari dalam penyusunan publikasi ini, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terwujudnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Pinrang, Oktober 2006  
**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG**  
K e p a l a,

**PAULUS MANGANDE, SE**  
NIP. 340013086

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunakan Dalam Penghitungan	7
2.2	Jenjang pendidikan dan Skor yang Digunakan Untuk Menghitung Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	10
3.1	PDRB Kabupaten Pinrang Tahun 2000-2004	15
3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004	19
3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004	20
3.4	Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004	21
5.1	Persentase Penduduk yang Mengeluh Sakit Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2001 dan 2004	31
6.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2001 dan 2004	34
6.2	Persentase Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2001 dan 2004	36
6.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah (7-24 tahun) Tahun 2001 dan 2004	37
7.1	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pinrang Tahun 2001 dan 2004	40
7.2	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2001 dan 2004	41
7.3	Penduduk Usia Kerja 10 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2001 dan 2004	43
7.4	Persentase Penduduk 10 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2001 dan 2004	44

8.1	Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Tahun 2001 dan 2004	49
8.2	Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Dinding Terbanyak Tahun 2001 dan 2004	50
8.3	Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Atap Terbanyak Tahun 2001 dan 2004	51
8.4	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2001 dan 2004	52
8.5	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2001 dan 2004	53
8.6	Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Kloset Tahun 2001 dan 2004	54
8.7	Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Tinja Tahun 2001 dan 2004	56
8.8	Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tahun 2001 dan 2004	56

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
4.1	IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 dan 2004	27

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik</i>		<i>Halaman</i>
5.1	AKB dan AHH Kabupaten Pinrang Tahun 2001 dan 2004	28
7.1	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2004	39
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2001 dan 2004	46
7.3	Angka Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2001 dan 2004	47
8.1	Persentase Rumahtangga Menurut Jenis Lantai Tahun 2004	49

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Grafik.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Konsep dan Definisi Indeks Pembangunan Manusia.....	6
2.1.1. Angka Harapan Hidup.....	8
2.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah.....	9
2.1.3. Purchasing Power Parity.....	10
2.2. Sumber Data.....	11
BAB III. GAMBARAN UMUM	12
3.1. Letak Geografis.....	12
3.2. Kependudukan.....	12
3.3. Ekonomi (PDRB).....	14

3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	16
3.5. Trend Alokasi APBD.....	16
BAB IV. POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA	22
4.1. Komponen-komponen IPM.....	23
4.1.1. Indeks Kesehatan.....	23
4.1.2. Indeks Pendidikan.....	23
4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli.....	24
4.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	24
BAB V. KESEHATAN	30
5.1. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup.....	30
5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan.....	31
BAB VI. PENDIDIKAN	33
6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	33
6.2. Tingkat Pendidikan.....	35
6.2.1. Angka Melek Huruf.....	35
6.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah.....	36
6.2.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	36
6.3. Tingkat Partisipasi Sekolah.....	38
BAB VII. KETENAGAKERJAAN	40
7.1. Angkatan Kerja.....	40
7.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	42
7.3. Lapangan Pekerjaan Utama.....	43

7.4. Pengangguran.....	44
7.4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	44
7.4.2. Angka Setengah Pengangguran.....	45
BAB VIII. PENUTUP	47
8.1. Kesimpulan.....	47
8.2. Implikasi Kebijakan.....	48

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang Digunakan Dalam Penghitungan	7
2.2. Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan Untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	10
3.1. PDRB Kabupaten Pinrang Tahun 2001-2005	15
3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004-2005	19
3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004-2005	20
3.4. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004-2005	21
4.1. Nilai dan Rangkings Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2002 dan 2005	29
6.1. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005	35
6.2. Persentase Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2002 dan 2005	37
6.3. Angka PArtisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah (7-24 tahun) Tahun 2002 dan 2005	38
7.1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pinrang Tahun 2002 dan 2005	41
7.2. Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005	42
7.3. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2002 dan 2005	43

## DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik</i>	<i>Halaman</i>
5.1. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup	30
7.1. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2005	40
7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005	45
7.3. Angka Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005	46

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Belakangan ini perhatian global disamping terfokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi dan perlunya dilaksanakan reformasi ekonomi, juga perlunya diperhatikan dimensi manusia dalam pembangunan. Hal terakhir muncul sebagai salah satu isu sehubungan dengan tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia dan hak-hak azasinya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pemikiran tentang pembangunan (paradigma) di dunia. Pada dekade 60-an, pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi (*production centered development*) dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi bukanlah akhir dari tujuan pembangunan, tetapi hanya sebagai alat/cara untuk mencapai tujuan yang lebih esensial yaitu *human security*. Dalam kerangka pemikiran ini manusia tidak ditempatkan sebagai faktor variabel, tetapi hanya sebagai faktor produksi. Kemudian pada dekade 70-an paradigma pembangunan bergeser dengan lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*) pada dekade 80-an, dan memasuki tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Berbagai pergeseran dalam kebijaksanaan pembangunan menyebabkan pengukuran terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada harus disesuaikan. Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat sering menuntut adanya ukuran baku. Upaya untuk mengangkat manusia sebagai tujuan utama pembangunan sebenarnya telah muncul dengan lahirnya konsep “*basic need development*”. Paradigma ini mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index*), yang memiliki tiga parameter yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek huruf.

Kemudian dengan muncul dan berkembangnya paradigma baru pembangunan manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** atau *Human Development Index (HDI)* untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia suatu negara atau wilayah. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pembangunan di Kabupaten Pinrang untuk melihat kinerja pembangunan di wilayah ini.

## 1.2. Tujuan Penulisan

Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang 2005 disusun dalam kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga diharapkan daerah mempunyai

indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Disamping itu, IPM berfungsi sebagai input dalam penyusunan Pola Dasar (Poldas) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada), agar jiwa pembangunan pada era reformasi ini terimplementasi dalam dokumen perencanaan dan untuk penajaman prioritas pembangunan.

Penggunaan salah satu indikator komposit (Indeks Pembangunan Manusia) dalam tulisan ini diharapkan pula dapat memberikan gambaran umum kinerja pembangunan Kabupaten Pinrang selama periode 2002-2005.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Bab satu menguraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. Kemudian Bab Dua membahas tentang metodologi, yang meliputi pengertian konsep, metode yang digunakan dan penjelasan komponen-komponen dan cara penghitungan indeks masing-masing komponen serta sumber data yang digunakan. Bab Tiga membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Pinrang yang diuraikan atas letak geografis, kependudukan, ekonomi (PDRB), potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dan trend alokasi APBD. Kemudian Bab Empat membahas mengenai posisi pembangunan manusia yang meliputi : Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Paritas Daya Beli serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bab Lima membahas masalah kesehatan

yang meliputi : angka kematian bayi, angka harapan hidup dan pelayanan kesehatan. Bab Enam membahas mengenai pendidikan yang meliputi: sarana dan prasarana pendidikan, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah. Bab Tujuh membahas mengenai ketenagakerjaan yang meliputi : angkatan kerja, lapangan pekerjaan utama dan pengangguran. Selanjutnya Bab Delapan adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijakan.

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang memungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut digunakan dalam perspektif yang berbeda dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak

diukur. Maka dalam laporan ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan buku ini.

## 2.1. Konsep dan Definisi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup ( $e_0$ ), indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$IPM = 1/3 [ X(1) + X(2) + X(3) ]$$

Dimana : X(1) : Indeks harapan hidup  
X(2) : Indeks pendidikan =  $2/3$  (indeks melek huruf) +  $1/3$  (indeks rata-rata lama sekolah)  
X(3) : Indeks paritas daya beli

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya

dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$Indeks X(i) = \frac{X(i) - X(i) \text{ min}}{X(i) \text{ maks} - X(i) \text{ min}}$$

Dimana : X(i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)  
 X(i) maks : Nilai maksimum X(i)  
 X(i) min : Nilai minimum X(i)

**Tabel 2.1**  
**Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM**  
**Yang Digunakan Dalam Penghitungan**

Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai Maks	Nilai Min	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan (Pendekatan terhadap daya beli)	732.720	300.000 (1996) 360.000 (1999)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : Indonesia Human Development Report 2001-Towards a new consensus (Democracy and Human Development in Indonesia)-BPS, BAPPENAS, UNDP.

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel

IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (longevity) yang diwakili dengan usia harapan hidup (life expectancy at age 0;  $e_0$ ), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu Angka Melek Huruf (literacy rate/Lit) dan rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) dan indikator hidup layak (decent living) atau kemakmuran yang diwakili oleh purchasing power parity/daya beli). Berhubung data PPP sulit diperoleh maka digunakan PDRB riil perkapita.

### **2.1.1. Angka Harapan Hidup ( $e_0$ )**

Seperti yang telah disebutkan dalam BPS-UNDP (1996: 8) bahwa sebenarnya agak “berlebihan” mengatakan variabel  $e_0$  dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat”, mengingat angka morbiditas tampaknya lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Meskipun demikian, karena keterbatasan data dan hanya sedikit negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan.

Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan resultante dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

### 2.1.2. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan data Susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk usia 10 tahun keatas. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah pertama adalah memberikan bobot variabel "ijazah/STTB tertinggi" yang dimiliki sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$MYS = \frac{\sum_{i=1}^{10} f_i * LSi}{\sum_{i=1}^{10} f_i}$$

- Dimana :
- $MYS$  : Rata-rata lama sekolah (dalam tahun)
  - $f_i$  : Frekuensi penduduk yang berumur 10 tahun keatas untuk jenjang pendidikan i.
  - $S_i$  : Skor masing-masing jenjang pendidikan i.
  - $LS_i$  : 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)
  - $LS_i$  :  $S_i$  (bila tamat)
  - $LS_i$  :  $S_i +$  kelas yang diduduki - 1 (bila masih bersekolah dan pernah tamat)
  - $LS_i$  : Kelas yang diduduki - 1 (bila jenjang yang diduduki SD/SR/MI/Sederajat)
  - $i$  : Jenjang pendidikan (1,2,3,...,10)

**Tabel 2.2**  
**Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk**  
**Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)**

Jenjang Pendidikan	Skor
(1)	(2)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SLTA/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I	13
Diploma II	14
Diploma III/Akademi	15
Diploma IV/SI	16
S2/Magister	18
S3/Doktor	21

### 2.1.3. Purchasing Power Parity (PPP)

Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing Power Parity (PPP) yang digunakan dalam laporan ini adalah PDRB riil perkapita yang telah disesuaikan (*adjusted real GRDP per capita*), seperti yang telah digunakan oleh UNDP. Berbeda dengan laporan IPM 1996 yang telah menggunakan komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP. Dengan menggunakan PDRB riil perkapita ini berarti mengasumsikan bahwa hasil dari PDRB daerah dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk wilayah ini.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil, yang dianggap kemampuan daya beli (U), secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$U(y) = y'$	jika $y \leq y'$
$= y' + 2(y - y')^{(1/2)}$	jika $y' < y \leq 2y'$
$= y' + 2(y - y')^{(1/2)} + 3(y - 2y')^{(1/3)}$	jika $2y' < y \leq 3y'$
$= y' + 2(y - y')^{(1/2)} + 3(y - 2y')^{(1/3)} + 4(y - 3y')^{(1/4)}$	jika $3y' < y \leq 4y'$
$\text{dst.}$	

Dimana : y = PDRB riil per kapita

y' = threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (Garis Kemiskinan) yang dalam laporan ini nilai y ditetapkan sebesar Rp. 540.378,- per kapita setahun

## 2.2. Sumber Data

Pengukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah yang disajikan dalam tulisan ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2002 (Susenas 2002) dan Susenas 2005. Selain data survei tersebut sebagai pembanding juga disajikan data Sensus Penduduk.

Yang diungkapkan dalam penyajian laporan ini sebagai indikator atau basis adalah data yang dihasilkan dari Kor Susenas 2002 dan 2005 terutama yang berkaitan dengan indikator pendukung, seperti indikator kependudukan, indikator bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

##### **3.1. Letak Geografis**

Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961,77 km<sup>2</sup> secara geografis terletak pada 4<sup>o</sup>10'30" - 30<sup>o</sup>19'13" LS (Lintang Selatan) dan 119<sup>o</sup>26'30" - 119<sup>o</sup>47'20" BT (Bujur Timur). Sedangkan secara administrasi di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, di sebelah Timur dengan Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang (Sidrap), di sebelah selatan dengan Kotamadya Parepare, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Selat Makassar. Wilayah Administratif Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan dan 104 Desa/Kelurahan (36 kelurahan dan 68 Desa).

##### **3.2. Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2002, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2002) sekitar 313.801 yang terdiri dari 156.405 laki-laki dan 157.396 perempuan. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 335.554 jiwa pada tahun 2005 dengan komposisi 163.847 laki-laki dan 171.707 perempuan. Sex ratio penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 sekitar 99,37 yang berarti terdapat sekitar 99 orang laki-laki diantara 100 perempuan, kemudian pada tahun 2005 menurun menjadi sekitar 95,42.

Hasil Sensus Penduduk (SP) laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 1980-1990 sekitar 1,02 persen pertahun, kemudian pada kurun waktu 1990-2000 menjadi 0,46 persen pertahun. Sementara dalam kurun waktu 2002-2005 tumbuh sekitar 2,26 persen pertahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah ini, oleh banyak pihak merupakan suatu hal yang merisaukan apabila tidak dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah.

Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kabupaten Pinrang yaitu dari 160 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2002 menjadi 171 orang/km<sup>2</sup> pada tahun 2005. Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Jika hal tersebut diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, terutama dari segi ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk sedikit akan mengurangi masalah yang dirisaukan.

Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) pada tahun 2005 adalah sekitar 107.140 orang, penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 209.529 yang disebut dengan usia produktif dan mereka yang berusia lanjut (65 tahun lebih) sekitar 18.805 orang. Setelah dihitung maka angka beban tanggungan

adalah sebesar 60,15 atau secara hipotesis bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 menanggung beban ekonomi sekitar 60 orang usia tidak produktif. Angka beban tanggungan ini menurun dibandingkan tahun 2002 yaitu sebesar 63,20.

### **3.3. Ekonomi (PDRB)**

Potret potensi ekonomi secara keseluruhan sebenarnya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka ini juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya, yaitu dengan membagi PDRB dengan penduduk pertengahan tahun, atau sering disebut pendapatan perkapita. Akan tetapi pendapatan perkapita masih merupakan ukuran secara umum/kasar dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu belum sepenuhnya dapat mengukur taraf kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kabupaten Pinrang Tahun 2001-2005**

Tahun	Harga berlaku (milyar Rp)	Perkembangan (persen)	Harga Konstan (milyar Rp)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	1672,28	-	1546,20	-
2002	1833,68	9,68	1611,66	4,23
2003	1987,19	8,37	1688,28	4,75
2004	2198,81	10,65	1787,71	5,89
2005	2456,12	11,70	1895,72	6,04
Rata-rata		11,71		5,65

Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan Kabupaten Pinrang pada tahun 2001 sebesar 1546,20 (milyar rupiah) meningkat menjadi 1895,72 (milyar rupiah) pada tahun 2005 atau tumbuh dengan rata-rata 5,65 persen pertahun selama periode tersebut. Sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2005 adalah sektor pertanian yaitu sekitar 62,24 persen yang sebelumnya (tahun 2002) andilnya sekitar 65,71 persen terhadap PDRB.

Seperti kita ketahui bahwa PDRB regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun menghasilkan PDRB perkapita. PDRB perkapita Kabupaten Pinrang berdasarkan harga berlaku tahun 2002 sebesar 5.805.108 rupiah dan meningkat menjadi 7.319.784 rupiah pada

tahun 2005. Namun disadari pula bahwa angka itu masih dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro suatu wilayah. Dengan adanya pengaruh ekonomi maka digunakan PDRB riil perkapita (PDRB berdasarkan harga konstan 2000), supaya tidak dipengaruhi inflasi. PDRB riil perkapita Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 sebesar 5.102.211 rupiah meningkat menjadi 5.649.689 rupiah pada tahun 2005.

#### **3.4. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.**

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lumbung padi di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2005, dengan luas panen untuk produksi padi seluas 80.746 Ha (42% luas Kabupaten Pinrang), mampu memproduksi padi sawah sebanyak 501.109 ton. Selain padi, produksi pertanian yang cukup dominan di Kabupaten Pinrang adalah coklat dengan luas areal 22.342 Ha menghasilkan 25.799 ton pada tahun 2005. Potensi lainnya adalah subsektor perikanan, baik perikanan laut, air payau maupun perikanan darat (kolam, sawah, sungai dan rawa). Produksi yang dihasilkan dari perikanan terutama ikan dan udang dengan jumlah produksi untuk perikanan laut 10.985,26 ton, empang/tambak 17.213,83 ton dan perikanan darat 866,92 ton.

#### **3.5. Trend Alokasi APBD**

Pada publikasi IPM tahun 2005 ini, tidak dilakukan analisis trend APBD tahun 2002 terhadap tahun 2005 karena adanya perbedaan sistem

anggaran tahun 2002 yaitu sistem anggaran berimbang dan sistem anggaran tahun 2005 yang berbasis kinerja dengan sistem surplus/defisit anggaran dimana sistem ini sudah berjalan sejak tahun 2004. Oleh karena itu dilakukan analisis trend APBD tahun 2004 terhadap tahun 2005. Adanya perubahan sistem ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha dan Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD. Struktur APBD pada anggaran yang berbasis kinerja ini dibagi dalam tiga komponen besar yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Komponen pertama adalah pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah Kabupaten Pinrang pada tahun anggaran 2004 sebesar 222.073,47 juta rupiah meningkat menjadi sebesar 234.049,33 juta rupiah pada tahun 2005.

Komponen kedua adalah belanja daerah, dipergunakan untuk belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja Daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2004 sebesar 219.603,91 juta rupiah meningkat menjadi sebesar 222.981,09 juta rupiah pada tahun 2005. Belanja daerah ini sebagian besar digunakan untuk pelayanan publik yang mencapai sekitar 68 % dari total belanja daerah.

Komponen ketiga adalah pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada tahun 2005 terlihat defisit anggaran sekitar 2469,56 juta rupiah dikarenakan sisi penerimaan daerah hanya sekitar 7261,18 juta rupiah sementara sisi pengeluaran daerah sekitar 9730,75 juta rupiah. Defisit anggaran mengalami peningkatan pada tahun 2005 menjadi sekitar 11.068,24 juta rupiah atau naik sebesar 8598,68 juta rupiah.

<http://pinrangkab.bps.go.id>

**Tabel 3.2**  
**REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN PINRANG, TAHUN ANGGARAN 2004-2005**

SUMBER PENDAPATAN	J U M L A H	
	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
(1)	(2)	(3)
<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>13.128.840.375</b>	<b>12.026.727.209,25</b>
a. Pajak daerah	2.597.852.000	3.133.042.177,00
b. Retribusi Daerah	5.366.375.900	5.465.205.572,00
c. Hasil PMD & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.035.000.000	1.737.390.253,53
d. Lain-Lain PAD yang Sah	3.129.612.475	1.691.089.206,72
<b>2. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>207.184.899.136</b>	<b>222.022.602.259,00</b>
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	19.079.423.300	20.213.371.721,00
b. Dana Alokasi Umum	165.704.000.000	178.389.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	14.720.559.000	14.520.000.000,00
d. Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan dari Propinsi	7.680.916.836	8.900.230.538,00
<b>3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>1.759.732.000</b>	<b>0</b>
a. Bantuan	1.759.732.000	0
<b>J U M L A H</b>	<b>222.073.471.511</b>	<b>234.049.329.468,25</b>

Sumber : BKD Kabupaten Pinrang

**Tabel 3.3**  
**REALISASI BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN PINRANG, TAHUN ANGGARAN 2004-2005**

BELANJA DAERAH	TAHUN	
	Tahun 2004 (Rp)	Tahun 2005 (Rp)
(1)	(2)	(3)
<b>1. APARATUR DAERAH</b>	<b>59.149.591.335</b>	<b>70.960.507.570</b>
<i>a. Belanja Administrasi Umum</i>	45.507.239.880	49.562.202.000
- Belanja Pegawai/Personalia	31.175.675.442	33.363.541.893
- Belanja Barang & Jasa	9.496.215.338	10.082.345.102
- Belanja Perjalanan Dinas	2.205.574.000	2.890.621.887
- Belanja Pemeliharaan	2.629.775.100	3.225.693.118
<i>b. Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</i>	7.581.390.155	9.604.156.845
- Belanja Pegawai/Personalia	2.917.397.930	2.899.814.610
- Belanja Barang & Jasa	3.680.045.785	5.546.857.085
- Belanja Perjalanan Dinas	955.046.440	1.094.463.900
- Belanja Pemeliharaan	28.900.000	63.021.250
<i>c. Belanja Modal</i>	6.060.961.300	11.794.148.725
<b>2. PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>160.454.315.516</b>	<b>152.020.584.344</b>
<i>a. Belanja Administrasi Umum</i>	95.041.728.752	93.667.589.274
- Belanja Pegawai/Personalia	88.779.858.552	87.232.503.549
- Belanja Barang & Jasa	4.590.845.200	5.683.139.185
- Belanja Perjalanan Dinas	929.815.000	153.722.150
- Belanja Pemeliharaan	741.210.000	598.224.390
<i>b. Belanja Operasi &amp; Pemeliharaan</i>	8.927.290.145	8.139.959.803
- Belanja Pegawai/Personalia	1.206.739.395	941.309.500
- Belanja Barang & Jasa	6.612.514.225	6.588.078.503
- Belanja Perjalanan Dinas	918.922.525	517.901.800
- Belanja Pemeliharaan	189.114.000	92.670.000
<i>c. Belanja Modal</i>	39.680.329.953	35.801.422.827
<i>d. Belanja Bagi Hasil &amp; Bantuan Keuangan</i>	15.182.507.389	13.652.536.440
<i>e. Belanja Tidak tersangka</i>	1.622.459.277	759.076.000
<b>J U M L A H</b>	<b>219.603.906.851</b>	<b>222.981.091.914</b>

Sumber : BKD Kabupaten Pinrang

**Tabel 3.4**  
**REALISASI PEMBIAYAAN**  
**KABUPATEN PINRANG, TAHUN ANGGARAN 2004-2005**

PEMBIAYAAN	T A H U N	
	Tahun 2004 (Rp) (2)	Tahun 2005 (Rp) (3)
(1)		
<b>1. PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>7.261.184.009</b>	<b>2.350.773.789,31</b>
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Lalu	234.465.133	1.232.354.312,31
b. Transfer dari Dana Cadangan	0	0,00
c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0	0,00
d. Hasil Penjualan Aset Daerah yg Dipisahkan	0	0,00
e. Pengemb. Pinj. Dana Pemberdayaan Masy.	7.026.718.876	844.720.559,00
f. Transfer dari Dana Deposito	0	0,00
g. Penerimaan dari Dana Penguatan/ Penyertaan Modal	0	0,00
h. Penerimaan dari Dana Operasional AMP	0	150.000.000,00
i. Penerimaan Piutang Tahun Lalu	0	119.474.194,00
j. Penerimaan Utang PFK		4.224.724,00
<b>2. PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>9.730.748.669</b>	<b>13.419.011.343,56</b>
a. Transfer ke Dana Cadangan	0	0,00
b. Penyertaan Modal	2.500.000.000	1.599.216.268,44
c. Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo	2.668.429.000	2.000.000.000
d. Sisa Lebih Perh. Anggaran Tahun Berjalan	87.319.669	9.669.795.075,12
e. Pinj. Dana untuk Pemberdayaan Masy.	4.475.000.000	0,00
f. Dana Operasional AMP	0	150.000.000,00
g. Pembayaran Utang PFK	0	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (Defisit)</b>	<b>2.469.564.660</b>	<b>11.068.237.554,25</b>

Sumber : BKD Kabupaten Pinrang

## **BAB IV**

### **POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA**

Dalam era reformasi sekarang ini, otonomi daerah telah diterapkan secara menyeluruh sejak tahun 2001, sehingga roda pembangunan diharapkan lebih dekat ke masyarakat, lebih cepat pelayanannya, lebih murah biayanya dan lebih sesuai dengan kebutuhan riilnya. Untuk itu, tingkat keberhasilan pembangunan (kinerja) perlu diukur pada suatu daerah. Dalam pembahasan ini, kinerja pembangunan yang dimaksud adalah kinerja pembangunan manusia yang disajikan dalam satu indikator komposit (angka tunggal) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Komponen-komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli.

## **4.1. Komponen-komponen indeks Pembangunan Manusia**

### **4.1.1. Indeks Kesehatan**

Indeks kesehatan diwakili dengan Angka Harapan Hidup ( $e_0$ ) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Pada tahun 2002 indeks kesehatan Kabupaten Pinrang tercatat sekitar 73,5 meningkat menjadi sekitar 76,0 pada tahun 2005. Sementara indeks kesehatan Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dari sekitar 72,67 pada tahun 2002 menjadi sekitar 72,83. Adanya peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Pinrang pada khususnya dan di Sulawesi Selatan pada umumnya semakin membaik.

### **4.1.2. Indeks Pendidikan**

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 71,18 pada tahun 2002 menjadi 74,73 pada tahun 2005. Hal ini disebabkan karena komponen angka melek huruf mengalami peningkatan dari 86,1 persen pada tahun 2002 menjadi 89,1 persen pada tahun 2005. Sementara itu rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 6,2 tahun pada tahun 2002 menjadi 6,9 pada tahun 2005.

#### **4.1.3. Indeks Paritas Daya Beli**

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, dalam laporan ini digunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi Susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kabupaten Pinrang dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai standar hidup layak. Daya beli penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 sekitar Rp. 590.100 meningkat menjadi sekitar Rp. 621.100 pada tahun 2005. Sedangkan rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sekitar Rp. 616.800.

Indeks PPP di Kabupaten Pinrang sekitar 53,18 pada tahun 2002, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 60,34. Hal ini menunjukkan kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Sulawesi Selatan indeks PPP-nya 59,35 pada tahun 2005.

#### **4.2. Indeks Pembangunan Manusia**

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan

Manusia) merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 sekitar 66,0 kemudian mengalami peningkatan menjadi 70,36 pada tahun 2005. Posisi IPM Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 berada pada peringkat ke-9 dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, sedangkan posisi pertama adalah Kota Makassar (73,9) dan posisi terakhir Kabupaten Jeneponto (57,8). Kemudian tahun 2005 posisi IPM Kabupaten Pinrang naik tiga tingkat ke peringkat ke-6 dari 23 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, sedangkan peringkat pertama dan terakhir masih sama seperti tahun 2002. IPM Sulawesi Selatan tahun 2005 adalah 68,04.

Berdasarkan kriteria UNDP nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang. Nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM diatas 79 (>79) digolongkan tinggi. Dengan demikian sesuai dengan kriteria tersebut, IPM Kabupaten Pinrang tergolong IPM menengah, baik IPM pada tahun 2002 maupun IPM pada tahun 2005.

Perubahan posisi IPM periode 2002-2005 dapat dilihat pada Gambar 3.1, dengan sumbu vertikal adalah nilai IPM tahun 2002 dan sumbu horizontal adalah nilai IPM 2005. Pada gambar tersebut terdapat sumbu yang menggambarkan nilai IPM Sulawesi Selatan pada tahun 2002 dan 2005, yang kemudian membentuk empat kuadran.

Kuadran I adalah yang berada di sebelah kanan sumbu IPM Sulawesi Selatan 2002 dan di sebelah atas sumbu IPM Sulawesi Selatan 2005. Pada posisi ini adalah Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Luwu Utara yang merupakan IPM paling ideal (baik) dibandingkan dengan yang lainnya.

Kuadran II adalah yang berada di sebelah kiri sumbu IPM Sulawesi Selatan 2002 dan di sebelah atas sumbu IPM Sulawesi Selatan 2005. Pada posisi ini adalah Kabupaten Barru dimana nilai IPM 2002 Kabupaten Barru lebih tinggi daripada nilai IPM Sulawesi Selatan dan nilai IPM 2005 lebih rendah daripada nilai IPM Sulawesi Selatan.

Posisi nilai IPM yang perlu benar-benar diperhatikan berada pada kuadran III, yaitu sebelah kiri sumbu IPM Sulawesi Selatan 2002 dan sebelah bawah sumbu IPM Sulawesi Selatan 2005. Kabupaten yang berada pada kuadran ini berarti secara konsisten dalam periode 2002-2005 kinerja pembangunannya dapat dikatakan tergolong rendah atau dibawah rata-rata Sulawesi Selatan baik pada tahun 2002 maupun pada tahun 2005, yaitu Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten

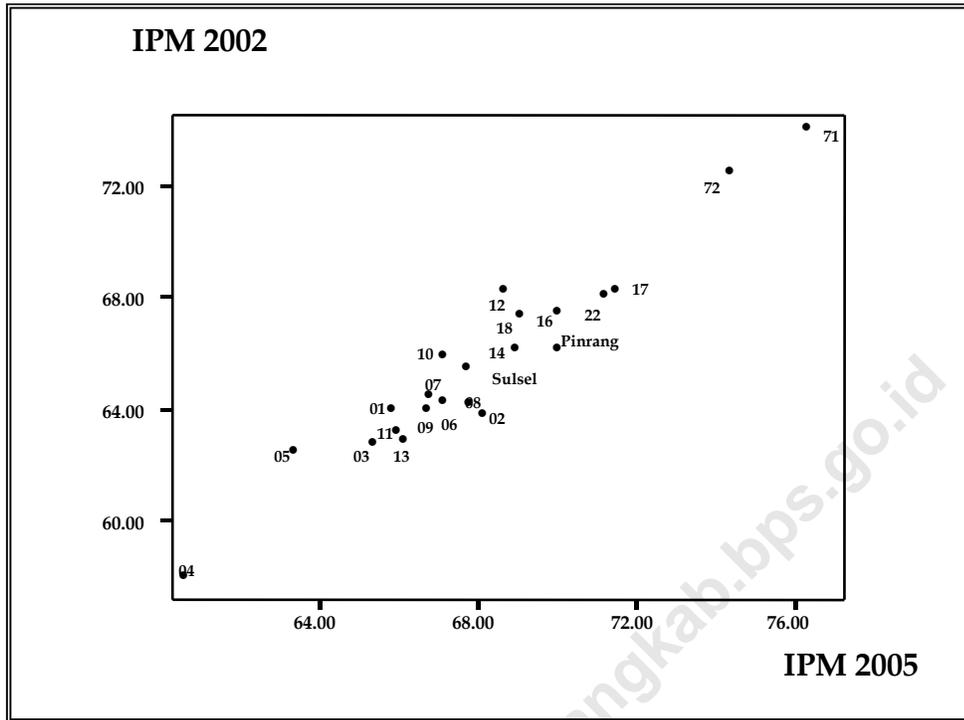
Bone, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten yang berada di kuadran IV (sebelah kanan sumbu IPM Sulawesi Selatan 2002 dan sebelah bawah sumbu IPM Sulawesi Selatan 2005) adalah kabupaten yang pada tahun 2002 kinerjanya dibawah rata-rata Sulawesi Selatan, tetapi pada tahun 2005 berada diatas rata-rata Sulawesi Selatan. Kabupaten tersebut adalah Bulukumba dan Maros.

<http://pinrangkab.bps.go.id>

Gambar 4.1

IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002 dan 2005



Keterangan :

- |               |             |                 |                |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| 01. Selayar   | 07. Sinjai  | 13. Wajo        | 22. Luwu Utara |
| 02. Bulukumba | 08. Maros   | 14. Sidrap      | 25. Luwu Timur |
| 03. Bantaeng  | 09. Pangkep | 15. Pinrang     | 71. Makassar   |
| 04. Jeneponto | 10. Barru   | 16. Enrekang    | 72. Pare-Pare  |
| 05. Takalar   | 11. Bone    | 17. Luwu        | 73. Palopo     |
| 06. Gowa      | 12. Soppeng | 18. Tana Toraja |                |

**Tabel 4.1.**  
**Nilai dan Rangkings Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Tahun 2002 dan Tahun 2005**

Lokasi	IPM		Rangkings	
	2002	2005	2002	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Selayar	63,8	66,18	15	20
02. Bulukumba	63,6	68,46	17	12
03. Bantaeng	62,6	65,69	21	21
04. Jeneponto	57,8	60,92	24	23
05. Takalar	62,3	63,72	22	22
06. Gowa	64,1	67,46	12	5
07. Sinjai	64,3	67,10	11	16
08. Maros	64,0	68,09	13	13
09. Pangkep	63,8	67,06	16	17
10. Barru	65,7	67,48	10	14
11. Bone	63,0	66,30	18	19
12. Soppeng	68,1	69,02	3	11
13. Wajo	62,7	66,46	20	18
14. Sidrap	66,0	69,29	8	10
15. Pinrang	66,0	70,36	9	6
16. Enrekang	67,3	70,36	6	7
17. Luwu	68,1	71,83	4	4
18. Tana Toraja	67,2	69,43	7	8
22. Luwu Utara	67,9	71,54	5	5
25. Luwu Timur *)	-	69,39	-	9
71. Kota Makassar	73,9	76,63	1	1
72. Kota Pare-Pare	72,3	74,68	2	2
73. Kota Palopo *)	-	73,77	-	3
Sulsel	65,3	68,04		

Sumber : Susenas 2002, Susenas 2005

Keterangan:

\*) : masih bergabung dengan Kabupaten induk, Kab. Luwu Timur masih bergabung dengan Kab. Luwu Utara, dan Kota Palopo masih bergabung dengan Kab. Luwu.

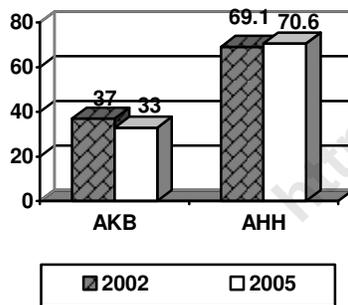
## BAB V

### KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan agar tercapai derajat kesehatan yang baik. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dengan memberikan penyuluhan agar masyarakat membiasakan diri untuk hidup sehat dan menyediakan beberapa fasilitas kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil.

#### 5.1. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup

Grafik 5.1.  
AKB dan AHH Kabupaten Pinrang  
Tahun 2002 dan 2005



Salah satu indikator kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan adalah angka kematian bayi (AKB) per seribu kelahiran hidup. Selama tiga tahun terakhir, AKB di Kabupaten Pinrang menunjukkan penurunan dari 37 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 33 pada tahun 2005.

Ini berarti dari setiap 1000 kelahiran hidup, 33 diantaranya meninggal dunia sebelum mencapai usia satu tahun. Terjadinya penurunan AKB merupakan indikasi terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami sedikit peningkatan dari 69,1 pada tahun 2002 menjadi 70,6 pada tahun 2005. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa penduduk Kabupaten Pinrang rata-rata dapat menjalani hidup selama 71 tahun. Sedangkan AHH di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sekitar 68,7 tahun. Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun eksogen (pengaruh dari luar). Variabel eksogen antara lain : input makanan, upaya kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag) tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri maupun bersinergi dengan variabel lain.

## **5.2. Pemerataan Pelayanan Kesehatan**

Fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan penanggulangan kesehatan masyarakat. Fasilitas yang tersedia tanpa didukung dengan tenaga yang mengerti di bidangnya tentunya akan kurang bermakna, begitu juga sebaliknya tenaga yang tersedia tanpa fasilitas yang memadai akan mendapatkan hasil yang kurang optimal.

Dalam rangka pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat disamping telah tersedianya Rumah Sakit Umum yang berada di ibukota kabupaten, pada tahun 2005 terdapat 12 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan. Hanya satu kecamatan yang tidak memiliki puskesmas yaitu kecamatan Paleteang. Hal ini disebabkan karena wilayahnya dekat dengan kota, sehingga fasilitas kesehatan yang ada di kota bisa dijangkau dengan mudah.

Untuk menjangkau semua penduduk dalam wilayah kerja masing-masing rasanya agak sulit dilakukan oleh puskesmas, apalagi mengingat beberapa daerah mempunyai kondisi geografis yang cukup sulit. Oleh sebab itu harus ditunjang dengan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang setingkat dibawahnya yang disebut Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu. Pada tahun 2005 Pustu di Kabupaten Pinrang sebanyak 55 buah dan Posyandu 344 buah yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 terdapat 3 rumah bersalin, 22 klinik KB Program dan 6 Klinik KB Non Program. Sedangkan banyaknya tenaga kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 adalah 615 orang

## **BAB VI**

### **PENDIDIKAN**

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan penduduk berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin baik, yang pada akhirnya akan meningkat pula produktivitas dalam semua sektor pembangunan.

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan berbagai paket seperti program wajib belajar, pendidikan luar sekolah, sekolah terbuka dan lain sebagainya. Program pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah, menurunkan angka buta huruf, serta meningkatkan jenjang pendidikan penduduk.

#### **6.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering terdengar bahwa banyaknya guru yang enggan ditempatkan pada daerah terpencil tersebut sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah perkotaan.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecilnya angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Pada tahun 2004 rasio murid-guru SD/MI sekitar 20,73. Ini berarti ada sekitar 21 murid yang harus ditangani oleh seorang guru pada sebuah sekolah tempat dia mengajar. Pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi sekitar 15,90. Untuk rasio murid-guru SLTP/MTs, pada tahun 2004 sekitar 13,90 meningkat menjadi sekitar 14,22 pada tahun 2005. Sedangkan rasio murid-guru SLTA/MA pada tahun 2004 sekitar 13,81 kemudian pada tahun 2005 menurun menjadi sekitar 10,59.

Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah. Salah satu kegunaannya adalah untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta membangun sekolah baru pada suatu tempat.

Rasio murid-sekolah SD/MI di Kabupaten Pinrang pada tahun 2004 sekitar 156,31 menurun menjadi sekitar 140,63 pada tahun 2005. Ini berarti dalam satu sekolah terdapat sekitar 141 murid SD/MI pada tahun 2005. Penurunan juga terjadi pada rasio murid-sekolah SLTP/MTs yaitu dari sekitar 265,91 pada tahun 2004 menjadi sekitar 252,10 pada tahun 2005. Begitu pula dengan rasio murid-sekolah SLTA/MA mengalami penurunan dari sekitar 373,59 pada tahun 2004 menjadi sekitar 333,55 pada tahun 2005.

## 6.2. Tingkat Pendidikan

### 6.2.1. Angka Melek Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf jika mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis, Makassar, Jawa, Cina dan sebagainya. Kalau seseorang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Hasil Susenas 2005 di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun keatas sekitar 89,1. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan bila dibanding tahun 2002 yaitu sekitar 86,1.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	91,27	84,82	86,1
2005	91,75	85,49	89,1

Sumber : Susenas 2002, 2005

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2002 selisih AMH laki-laki dan perempuan sekitar 6,45 poin sedangkan pada tahun 2005 sekitar 6,26 poin. Adanya penurunan selisih AMH laki-laki dan perempuan menunjukkan

semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tanpa melihat status jenis kelamin.

### **6.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah**

Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 sekitar 6,2 tahun. Kemudian menjadi 6,9 tahun pada tahun 2005. Dengan melihat angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 tingkat pendidikan penduduk rata-rata baru menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar, dan pada tahun 2005 belum menunjukkan adanya perubahan karena tingkat pendidikan penduduk rata-rata masih menyelesaikan pada tingkat SD. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat di bidang pendidikan di Kabupaten Pinrang tampaknya masih perlu ditingkatkan lagi.

### **6.2.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan**

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Di Kabupaten Pinrang, persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah menunjukkan peningkatan dari sekitar 13,28 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 13,60 persen pada tahun 2005. Sedangkan yang tidak tamat SD justru mengalami penurunan yaitu dari sekitar 25,64 persen

pada tahun 2002 menjadi sekitar 22,59 persen pada tahun 2005. Penduduk yang tamat SD juga mengalami penurunan dari sekitar 34,28 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 31,14 persen pada tahun 2005. Sedangkan peningkatan justru terjadi pada penduduk yang tamat SMTP yaitu dari sekitar 13,49 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 16,51 persen pada tahun 2005 dan tamat SMTA keatas yaitu dari sekitar 13,3 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 16,16 persen pada tahun 2005.

**Tabel 6.2**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas**  
**Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan**  
**Tahun 2002 dan 2005**

Tingkat Pendidikan	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Tdk/blm pernah sekolah	9,95	16,39	13,28	10,67	16,34	13,60
- Tdk Tamat SD	25,63	25,65	25,64	22,83	22,36	22,59
- SD	35,08	33,54	34,28	32,00	30,34	31,14
- SMTP	14,52	12,54	13,49	17,40	15,68	16,51
- SMTA keatas	14,84	11,88	13,30	17,09	15,33	16,16

Sumber : Susenas 2002, 2005

Berdasarkan jenis kelamin, untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan tidak/belum sekolah laki-laki mengalami peningkatan dan perempuan mengalami penurunan. Pada tingkat pendidikan yang ditamatkan tidak tamat SD dan tamat SD, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Sedangkan untuk tingkat pendidikan tamat SMTP dan SMTA keduanya menunjukkan adanya peningkatan.

### 6.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

**Tabel 6.3**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Penduduk Usia Sekolah (7-24 tahun)**  
**Tahun 2002 dan 2005**

KelompokUmur /JenisKelamin	2002	2005
(1)	(2)	(3)
7-12	94,18	93,33
Laki-laki	94,31	90,07
Perempuan	94,04	97,11
13-15	72,66	68,95
Laki-laki	71,66	68,30
Perempuan	73,64	69,81
16-18	37,92	49,50
Laki-laki	34,56	49,46
Perempuan	41,99	49,53
19-24	3,64	8,38
Laki-laki	2,67	8,54
Perempuan	4,55	8,24

Sumber : Susenas 2002, 2005

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah partisipasi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia SD (7-12 tahun) pada tahun 2002 sekitar 94,18 persen menurun menjadi sekitar 93,33 persen pada tahun 2005. Ini berarti terdapat 93,33 persen penduduk usia SD yang masih bersekolah. Pada

usia SLTP (13-15 tahun) juga mengalami penurunan dari sekitar 72,66 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 68,95 persen pada tahun 2005. Sedangkan untuk usia SLTA (16-18 tahun) justru mengalami peningkatan, pada tahun 2002 sekitar 37,92 persen naik menjadi sekitar 49,50 persen pada tahun 2005. Begitu pula pada usia Perguruan Tinggi (19-24 tahun) naik dari sekitar 3,64 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 8,38 persen pada tahun 2005. Akan tetapi penurunan APS seiring dengan semakin tingginya kelompok umur memberi gambaran adanya pertimbangan sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini karena selain pertimbangan tingginya biaya, juga kebutuhan rumah

tangga semakin meningkat sehingga anaknya cenderung diikutkan dalam kegiatan bekerja atau mencari kerja.

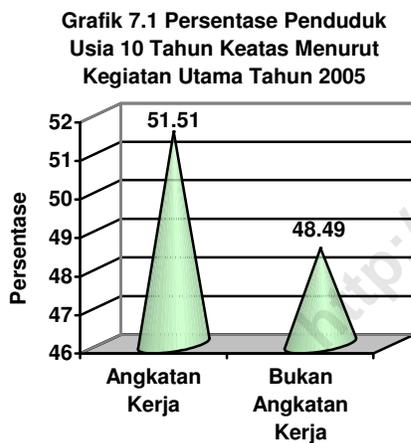
Menurut jenis kelamin, baik pada tahun 2002 maupun tahun 2005, APS perempuan pada usia SLTP dan SLTA lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan pada usia Perguruan Tinggi pada tahun 2005 APS laki-laki lebih tinggi daripada APS perempuan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak perempuan sampai jenjang pendidikan Perguruan Tinggi masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebiasaan sebagian masyarakat untuk lebih cepat mengawinkan anak perempuannya, disamping adanya persepsi terhadap kegiatan perempuan adalah kegiatan kerumahtanggaan yang dianggap tidak membutuhkan pendidikan tinggi.

## BAB VII

### KETENAGAKERJAAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun.

#### 7.1. Angkatan Kerja



Kegiatan penduduk usia 10 tahun keatas digolongkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan mencari kerja, sedang yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya.

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005, penduduk usia 10 tahun keatas yang termasuk dalam usia kerja terdiri dari sekitar 51,51 persen angkatan kerja dan sekitar 48,49 persen bukan angkatan kerja. Sementara itu, pertumbuhan angkatan kerja selama periode 2002-2005 sekitar 5,68 persen per tahun, lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk yaitu 2,26 persen per tahun. Oleh karena itu diperlukan daya dukung penyediaan kesempatan/lapangan kerja yang mencukupi.

**Tabel 7.1**  
**Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja**  
**di Kabupaten Pinrang Tahun 2002 dan 2005**

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja			Jumlah Penduduk
	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002	86.793	28.345	115.138	313.801
2005	95.718	40.194	135.912	335.554
Pertumbuhan (2002-2005) % per tahun	<b>3,32</b>	<b>12,35</b>	<b>5,68</b>	<b>2,26</b>

Sumber : Susenas 2002, 2005

Menurut jenis kelamin, terjadi pertumbuhan yang tinggi pada angkatan kerja perempuan yaitu sekitar 12,35 persen, sedangkan laki-laki sekitar 3,32 persen per tahun. Pertumbuhan yang tinggi pada angkatan kerja perempuan mungkin disebabkan karena tuntutan ekonomi keluarga yang semakin besar sehingga mendorong wanita turut bekerja mencari nafkah.

## 7.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (10 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi.

Menurut data Susenas, TPAK di Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 mencapai sekitar 51,51 persen yang berarti pada setiap 100 penduduk usia kerja sekitar 52 diantaranya termasuk angkatan kerja. Bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2002 yaitu sekitar 45,92 menunjukkan adanya peningkatan.

**Tabel 7.2.**  
**Penduduk Usia Kerja 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005**

Jenis Kegiatan Utama	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Bekerja	69,40	19,99	43,85	68,01	20,03	43,23
- Mencari kerja	2,27	1,87	2,07	7,02	9,46	8,28
- Sekolah	19,17	18,22	18,68	19,22	15,94	17,52
- Mengurus RT	0,83	54,11	28,38	0,74	48,92	25,62
- Lainnya	8,34	5,81	7,03	5,02	5,65	5,34
<b>TPAK</b>	<b>71,67</b>	<b>21,86</b>	<b>45,92</b>	<b>75,02</b>	<b>29,50</b>	<b>51,51</b>

Sumber : Susenas 2002, 2005

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, dimana TPAK laki-laki berkisar antara 70-80 sedangkan

TPAK perempuan berkisar antara 20-30. Salah satu sebab tingginya TPAK laki-laki dibanding perempuan karena laki-laki kebanyakan adalah bekerja yaitu sekitar 68,01 persen pada tahun 2005 sedangkan wanita kebanyakan adalah mengurus rumah tangga yaitu sekitar 48,92 persen.

### 7.3. Lapangan Pekerjaan Utama

**Tabel 7.3.**  
**Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2002 dan 2005**

Lapangan Pekerjaan Utama	2002			2005		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pertanian	74,78	40,48	66,70	72,18	53,21	67,64
- Pertambangan & Penggalian	0,15	-	0,11	0,27	-	0,21
- Industri	2,62	3,41	2,81	2,06	1,30	1,88
- Listrik, Gas & Air	0,15	-	0,11	0,14	-	0,11
- Konstruksi	2,56	0,48	2,07	2,49	0,43	1,99
- Perdagangan	7,11	33,86	13,42	7,59	27,14	12,27
- Angkutan & Komunikasi	4,36	-	3,33	4,53	0,43	3,55
- Keuangan	0,15	-	0,11	0,55	0,88	0,63
- Jasa	8,13	21,77	11,34	10,19	15,73	11,51
- Lainnya	-	-	-	-	0,89	0,21

Sumber : Susenas 2002, 2005

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah andalan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras dan hasil bumi lainnya. Oleh sebab itu sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Susenas 2005, banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 67,64 persen mengalami

peningkatan dibanding tahun 2002 yaitu sekitar 66,70 persen. Sedangkan sektor industri mengalami penurunan dari sekitar 2,81 persen pada tahun 2002 menjadi sekitar 1,88 persen pada tahun 2005. Selain sektor pertanian, sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa. Pada tahun 2005 penduduk yang bekerja di sektor perdagangan sekitar 12,27 persen dan di sektor jasa sekitar 11,51 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2002 mengalami penurunan sekitar 1,15 persen poin untuk sektor perdagangan dan peningkatan sekitar 0,17 persen poin untuk sektor jasa.

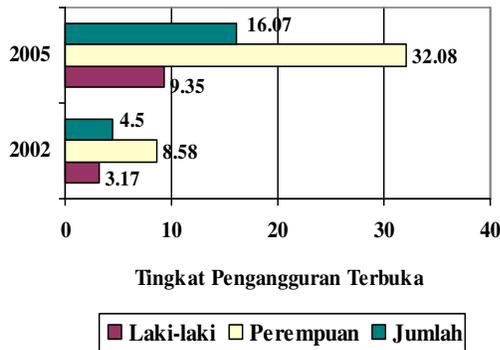
Menurut jenis kelamin, laki-laki dominan bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 72,18 persen sementara perempuan dominan di sektor pertanian, perdagangan dan jasa yaitu sekitar 53,21 persen untuk pertanian, 27,14 persen untuk perdagangan dan 15,73 persen untuk jasa.

#### **7.4. Pengangguran**

##### **7.4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja.

**Grafik 7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005**



Pada tahun 2002 TPT Kabupaten Pinrang sekitar 4,50 persen mengalami peningkatan menjadi sekitar 16,07 persen pada tahun 2005.

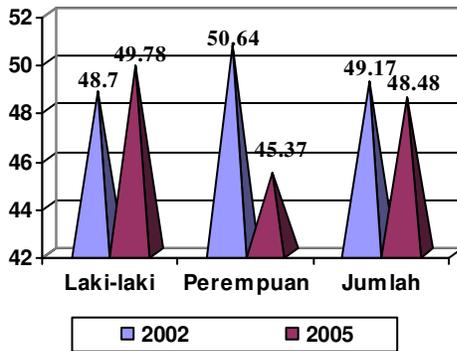
Berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan

mayoritas adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja sedangkan laki-laki mayoritas bekerja karena pencari nafkah dalam keluarga.

#### 7.4.2 Angka Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal disebut setengah pengangguran kentara. Sedangkan Angka Setengah Pengangguran (ASP) adalah perbandingan penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal dengan angkatan kerja. Pada tahun 2005 ASP di Kabupaten Pinrang sekitar 48,48 artinya diantara seratus angkatan kerja terdapat sekitar 48 orang yang bekerja kurang dari 35 jam. Angka ini tidak terlalu jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2002 yaitu sekitar 49,17.

**Grafik 7.3 Angka Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 dan 2005**



Menurut jenis kelamin, pada tahun 2002 ASP laki-laki adalah 49, lebih rendah daripada perempuan (51). Sedangkan pada tahun 2005 ASP laki-laki (50) justru lebih tinggi daripada perempuan (45).

<http://pinrangkab.bps.go.id>

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kesimpulan.**

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komposit merupakan salah satu ukuran yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia terutama upaya pemberdayaan dan kualitas sumber daya manusia dan partisipasinya dalam pembangunan.
- b. Selama kurun waktu 2002-2005 terjadi peningkatan kinerja pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pinrang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan IPM dari 66,0 pada tahun 2002 menjadi 70,36 pada tahun 2005.
- c. IPM Kabupaten Pinrang pada tahun 2002 menduduki peringkat ke-9 dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2005 menjadi peringkat ke-6 dari 23 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Baik pada tahun 2002 dan 2005 IPM Kabupaten Pinrang berdasarkan kriteria UNDP digolongkan menengah.
- d. Posisi IPM Kabupaten Pinrang termasuk dalam posisi IPM paling ideal (baik) yaitu posisi diatas rata-rata IPM Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan baik IPM tahun 2002 maupun IPM tahun 2005 Kabupaten Pinrang lebih tinggi daripada IPM Sulawesi Selatan.
- e. Indeks pendidikan Kabupaten Pinrang terjadi peningkatan selama kurun waktu 2002-2005 dari 71,18 pada tahun 2002 menjadi 74,73 pada

tahun 2005. Indeks pendidikan di Kabupaten Pinrang harus lebih ditingkatkan lagi Karena salah satu komponen indeks pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah masih rendah yaitu rata-rata baru menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar.

- f. Indeks kesehatan Kabupaten Pinrang terjadi peningkatan selama kurun waktu 2002-2005 dari 73,5 pada tahun 2002 menjadi 76,0 pada tahun 2005. Hal ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan di Kabupaten Pinrang semakin membaik
- g. Indeks paritas daya beli penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2002, yaitu dari 53,18 pada tahun 2002 menjadi 60,34 pada tahun 2005. Adanya peningkatan tersebut memberi gambaran daya beli penduduk Kabupaten Pinrang yang semakin membaik.

## **8.2. Implikasi Kebijakan**

- a. Adanya peningkatan indeks kesehatan menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat yang semakin baik. Kondisi ini harus terus ditingkatkan sehingga sasaran dari “Indonesia Sehat 2010” dapat dicapai. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui:
  - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pola hidup sehat baik bersifat preventif maupun kuratif dengan cara mengkonsumsi makanan

yang bergizi seimbang maupun menjaga kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.

- Adanya beberapa daerah yang masih kesulitan air bersih dan tidak tersedianya sanitasi umum perlu lebih diperhatikan dan diupayakan solusi pemecahannya.
- Pemeliharaan dan penambahan fasilitas kesehatan dan penambahan tenaga kesehatan yang berkualitas untuk lebih mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat termasuk di daerah pedesaan.
- Meningkatkan status gizi dan kesehatan terutama ibu hamil dan balita dengan cara pemberian kapsul zat besi terhadap ibu hamil, pemberian kapsul yodium (untuk ibu hamil, nifas dan Wanita Usia Subur (WUS)) dan pemberian kapsul vitamin dan imunisasi kepada balita.

b. Upaya peningkatan pendidikan dapat dilakukan melalui:

- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga diharapkan tercipta generasi muda yang berkualitas.
- Pengadaan bantuan kepada siswa yang kurang mampu dengan cara pembebasan segala macam biaya pendidikan/beasiswa perlu ditingkatkan.
- Peningkatan angka melek huruf sebagai upaya pemberantasan buta aksara melalui Kejar Paket A yang ditindaklanjuti dengan

- pembentukan kelompok pembaca dan penyediaan perpustakaan keliling.
- Menggiatkan program orang tua asuh kepada anak putus sekolah maupun yang kurang mampu.
  - Upaya peningkatan dan penganeekaragaman pendidikan non formal dalam bentuk kursus/ ketrampilan untuk menambah wawasan/pengetahuan, misalnya melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- c. Upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui :
- Perluasan lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun informal.
  - Menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja memberi ruang gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada para pelaku ekonomi tetapi juga mendorong serta membantu usaha kecil, tradisional dan sektor informal.